

DJUANDA KARTAWIDJAYA: DARI MENTERI HINGGA PERDANA MENTERI 1946-1959**ADE BAGUS SETYAWAN**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: adebagussetyawan@yahoo.co.id

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Djuanda Kartawidjaya merupakan pahlawan yang banyak berjasa dalam pembangunan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah, sebagai berikut : Apa yang latar belakang Ir. H. Djuanda Kartawidjaya diangkat menjadi Menteri dan Perdana Menteri?, bagaimana perjalanan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya ketika menjadi Menteri tahun 1946 hingga 1957?, Bagaimana kebijakan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dalam memimpin Kabinet Karya tahun 1957-1959?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran latar belakang awal kegiatan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya. Selanjutnya mendeskripsikan perjalanan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya selama menjadi Menteri tahun 1946 hingga 1957. Terakhir menganalisis kebijakan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dalam memimpin kabinet Karya tahun 1957 hingga 1959. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahapan *heurisristik* yaitu mengumpulkan data sejarah berupa koran sejaman dan dokumentasi sejaman, dalam tahapan kritik sumber peneliti hanya melakukan kritik *intern* sumber diseleksi dan dinilai kredibilitasnya, sehingga memperoleh fakta sejarah. Tahapan *interpretasi* peneliti mencari keterkaitan antar fakta sejarah yang diperoleh dengan menganalisisnya dan tahapan *historiografi* menyusun dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran kebijakan politik dan ekonomi Ir. Djuanda selama menjadi Menteri dan Perdana Menteri terhadap pembangunan Indonesia tahun 1946 hingga 1959.

Kata Kunci: Ir. Djuanda, Kebijakan, Menteri, Perdana Menteri, dan tahun 1946-1959.

Abstract

Juanda Kartawidjaya is a hero a lot of merit in the development of the Indonesian nation after independence. This study will answer the formulation of the problem as follows: What is the background of Ir. H. Juanda Kartawidjaya appointed Minister to the Prime Minister ?, how political trip Ir. H. Juanda Kartawidjaya when he became minister in 1946 and 1957 ?, How is the policy of Ir. H. Juanda Kartawidjaya in the lead djuanda cabinet in 1957-1959 ?. Based on the formulation of the above problems, the objectives to be achieved in this research is to explain the background of the beginning of the political activity Ir. H. Juanda Kartawidjaya. Further, describes the political journey Ir. H. Juanda over as Minister in 1946 until 1957. And lastly, analyzing the political policy Ir. H. Juanda Kartawidjaya in leading the work of the Cabinet in 1957 to 1959. This study uses historical research through the stages heurisristik which collects data in the form of newspaper history contemporaneous and contemporaneous documentation, the source criticism stage researchers only criticism selected internal resources and rated kredibilitasnya, so obtaining historical facts. Stages interpretation researchers are seeking linkages between historical facts obtained by analyzing and historiography stages of preparing and presenting the results in writing.

Keywords: Ir. Juanda, Policies, Minister, Prime Minister, and the years 1946-1959

PENDAHULUAN

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dengan melahirkan beberapa pahlawan dari awal penjajahan Belanda hingga pasca kemerdekaan. salah satu pahlawan negara Republik Indonesia yaitu Ir. H Djuanda Kartawidjaya. Ir. H. Djuanda Kartawidjaya merupakan pahlawan kemerdekaan yang sering terlupakan jasanya dan Ir. H. Djuanda merupakan tokoh dibalik pembangunan bangsa dan negara pasca kemerdekaan tahun 1945.

Ir. H. Djuanda Kartawidjaya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911 dari pasangan Raden Kartawidjaya dan Nyi Momot.¹ Latar belakang kehidupan intelektual Djuanda Kartawidjaya diawali ketika menempuh pendidikan dasar *Belanda Europeesche Lagere School* yang berada di Cicalengka². Kemudian melanjutkan pendidikan di HBS (*Hogere Burger School*) di Bandung pada tahun 1924. Ir. H. Djuanda juga melanjutkan kuliah jurusan Ilmu Teknologi di *Technische Hoge School* Bandung.

Perjalanan karir politik Ir. H. Djuanda dimulai ketika Indonesia berada dalam masa awal pemerintahan baru Indonesia tahun 1945 hingga masa peralihan sistem Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959. Pemerintahan Indonesia memerlukan pemimpin Djawatan Kereta Api. Ir. H. Djuanda diangkat oleh Pemerintah RI menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada awal tahun 1946.³

Pasca menjabat menjadi ketua Djawatan Kereta Api, Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan dan memiliki julukan Menteri Marathon karena menjadi salah satu menteri kabinet di awal pemerintahan Ir. Sorkarno, dari kabinet Syahrir, Moh Hatta, Wilopo hingga Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957. Menteri Perhubungan, Menteri Pengairan, Menteri Kemakmuran, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan.

Puncak karir politik Ir. H. Djuanda dalam pemerintahan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1957, saat dilantik menjadi Perdana Menteri dan memimpin kabinet yang disebut sebagai Kabinet Karya. Ir. Soekarno melantik Ir. H. Djuanda sebagai Perdana Menteri antara lain karena Kabinet Ali Sastroamijoyo II sudah demisioner, terjadi keadaan darurat dalam tubuh parlementer pemerintahan Indonesia, dan karena sosok Ir. H. Djuanda merupakan seorang jiwa yang demokratis, setia dan jujur.⁴

Kabinet Karya merupakan kabinet ahli atau kabinet *zaken* dan memiliki lima program kerja yang disebut

pancakarya. Adapun program Pancakarya antara lain membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan.

Kebijakan dalam program kerja tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Ir. Djuanda untuk melakukan politik luar negeri yang berkaitan dengan hukum maritim di Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan Deklarasi Djuanda dan diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa laut teritorial 12 mil dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulaunya adalah batas wilayah Indonesia.⁵ Deklarasi Djuanda dimaksudkan untuk menjamin keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional Indonesia sehingga menjadi negara kepulauan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi Deklarasi Djuanda sebagai terobosan baru untuk Pemerintahan Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia mengukuhkan Deklarasi Djuanda dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Prp. Th. 1960 tentang Perairan Indonesia dan mulai berlaku serta diterapkan di Indonesia tanggal 18 Februari 1960.⁶ Deklarasi Djuanda memiliki pengaruh penting bagi kegiatan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia, seperti untuk melindungi kekayaan alam di Indonesia yang melimpah dari perusahaan eksplorasi asing sehingga bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh penduduk lokal Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dari peranan politik dan pengabdian Ir. H. Djuanda Kartawidjaya terhadap NKRI, mengkaji dan menganalisis politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya selama menjadi Menteri, menganalisis perjalanan politik Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dalam memimpin Kabinet Karya. Oleh karena itu, menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Djuanda Kartawidjaya: Dari Menteri Hingga Perdana Menteri Tahun 1946 hingga 1959**"

METODE

Untuk melakukan penulisan mengenai sejarah yang sudah terjadi pada masa lalu memerlukan suatu proses penelitian. Penelitian dalam permasalahan tersebut dilakukan berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang telah ada, sehingga dari permasalahan tersebut dapat menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam sejarah ada 4 tahapan yang digunakan sebagai metodologi penelitian. Tahapan tersebut yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁷

¹ Kemensos RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial. *Profil Pahlawan Indonesia*. (Jakarta). hlm. 106.

² Mirnawati. *Kumpulan Pahlawan Indonesia*. (Jakarta : CIF Penebar Swadaya Grup, 2012), hlm. 86.

³ Maklumat Kementrian Perhubungan No./KA tanggal 23 Januari 1946.

⁴ Tim Kemendikbud. *Indonesia Dalam Arus Sejarah 7: Pasca Revolusi*. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 309.

⁵ Asnan Gusti. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. (Jakarta : Ombak, 2007), hlm. 3.

⁶ Moedjanto. *Indonesia Abad Ke-20*. (Jogjakarta : Kanisus, . 1988), hlm. 121.

⁷ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005). hlm. 10-11

Tahap awal penelitian, penulis melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang mampu menunjang atau mendukung penelitian yang disebut *heuristik*. *Heuristik* dibedakan menjadi sumber primer maupun sekunder. Kegiatan *Heuristik* penulis telah mampu mengumpulkan beberapa sumber yang diperlukan sehingga dapat menjadi pendukung dalam penyusunan hasil penelitian mengenai **“Djuanda Kartawidjaya : Dari Menteri hingga Perdana Menteri tahun 1946-1959”**..

Sumber primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dari peristiwa yang terjadi berupa dokumen, laporan resmi, arsip, surat, catatan harian, dan koran yang sejaman. Sumber primer yang diperoleh berupa arsip-arsip dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional, Website resmi sekretariat Pemerintahan Indonesia “www.sippu.setkab.go.id”, dan Website kumpulan berita koran Belanda “www.delpher.nl”.

Sumber sekunder adalah sumber yang merujuk dari karya sejarah berupa buku atau artikel yang berdasarkan sumber primer. Sumber sekunder berupa buku dan jurnal yaitu Aman Pratama, 2013. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959*. Sumber sekunder yang diperoleh penulis berupa buku, artikel, dan penelitian terdahulu berasal dari Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Sejarah Unesa, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Website Socia (Jurnal Ilmu Sosial).

Kritik sumber dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik Ekstern digunakan untuk menguji otentik, asli, turunan palsu serta relevan apa tidaknya suatu sumber tersebut, namun dalam penelitian ini kritik ekstern tidak digunakan karena dalam penelitian ini merujuk fakta sejarah berupa arsip dan dokumen. Kritik intern merupakan kritik yang digunakan dalam penelitian ini dan digunakan untuk menguji kevalidan isi atau kandungan sumber. Kedua kritik tersebut bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta.⁸

Tahap kritik sumber, penulis melakukan uji verifikasi sumber fakta sejarah terhadap beberapa sumber baik sumber primer maupun sekunder yang diperoleh. Pada tahap ini penulis memperoleh fakta-fakta sejarah yang kredibel, dan ditahap selanjutnya dilakukan interpretasi.

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap suatu fakta.⁹ Setelah melakukan kritik sumber, penulis memasuki tahap selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap suatu fakta. Pada tahap ini penulis

melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk mencari keterkaitan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Setelah itu dilakukan menggabungkan fakta-fakta dengan tujuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang akan dibahas.

Historiografi merupakan penulisan sejarah yang didapat dari fakta-fakta yang sudah diinterpretasi atau ditafsirkan yang kemudian disajikan secara tertulis sebagai suatu kisah atau cerita sejarah berupa bacaan ilmiah yang logis dan sistematis.¹⁰ Pada tahap ini setelah berhasil menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan tema, penulis menulis fakta-fakta tersebut sebagai hasil penelitian sejarah tentang **“Djuanda Kartawidjaya : Dari Menteri hingga Perdana Menteri tahun 1946-1959”**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Djuanda Kartawidjaya

a. Keluarga Guru

Djuanda merupakan anak pertama dari pasangan muda Raden Kartawidjaya dan Nyi Momot. lahir dikota Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911 dan diberi nama Djuanda Kartawidjaya.¹¹ Orang tua Djuanda yaitu Raden Kartawidjaya merupakan seorang Guru di *Hollads Inlandse School* yang merupakan sekolah untuk bumi putra dengan bahasa Belanda yang digunakan.

Sebagai seorang guru dan pegawai negeri, Raden Kartawidjaya sudah memikirkan dengan matang akan masa depan anak-anaknya sehingga mampu bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Djuanda bersekolah di *Holland Inlandse School* (HIS) ketika masih berada di Kuningan.¹² *Holland Inlandse School* merupakan sekolah elit di Hindia Belanda yang setara Sekolah Dasar masa sekarang, karena hanya anak dari seorang guru yang diizinkan sekolah di *Holland Inlandse School*. Djuanda mengalami kemajuan dalam belajar dengan mampu menguasai bahasa Belanda dan pelajaran berhitung atau matematika.

Djuanda merupakan anak yang pendiam, tapi Djuanda pernah masuk tim sepak bola di HIS. Menurut kesaksian Ahem Erningpraja yang merupakan teman semasa bersekolah di HIS, Djuanda pernah berposisi sebagai *Back*¹³ dalam sepak bola, dengan bola yang terbuat dari jeruk bali yang direndam abu panas agar bisa lunak, karena masa itu sangat mahal untuk membeli bola karet.¹⁴

Sekolah Djuanda berpindah dari *Holland Inlandse School* (HIS) ke *Eeuropese Legere School* (ELS) di Cicalengka karena Raden Kartawidjaya menginginkan

⁸ *ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ I.O. Nanulaita. *Ir. Haji Juanda Kartawidjaya*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm. 7.

¹² I.O. Nanulaita. *op.cit*, hlm. 9

¹³ *Back* adalah posisi pemain bertahan yang bertugas untuk menghentikan serangan-serangan yang

dilakukan oleh tim lawan. Andi Cipta. *Mahir Sepakbola*. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012) hlm. 31

¹⁴ Awaloedin Djamin. *Ir. H. Djuanda Negarawan, Administrator, dan, Teknokrat Utama*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001) hlm. 195, (Kesaksian Ahem Erningpraja)

Djuanda bisa sekolah insinyur di Bandung maupun sekolah kedokteran di Jakarta.¹⁵ Namun, untuk masuk di ELS tidak mudah karena harus memiliki kecakapan bahasa Belanda yang lebih, memiliki kepintaran diatas rata-rata anak lainnya dan orang tuanya harus pegawai di pemerintahan Hindia Belanda.

Djuanda mampu lulus dari tes masuk *Hogere Burger School* pada tahun 1924 di Bandung. Semakin matangnya ilmu yang diperoleh Djuanda dari *Hogere Burger School* membuat Djuanda berkeinginan untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi *Technische Hoge School* yang berada di Bandung.

Djuanda dengan segudang prestasinya membuat Direktur *Hogere Burger School* Dr. Ir. F. Gisolf membantunya melanjutkan studi di *Technische Hoge School* Bandung dan sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung.¹⁶ Atas bantuan Dr. Ir. F. Gisolf, Djuanda mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di THS, dan mampu masuk di *Faculteit Weg en Waterbouwkunde* yang kemudian berganti nama menjadi *Faculteit van Technische Wetenschappen* (Fakultas Ilmu-Ilmu Teknologi).

b. Masa Remaja Djuanda

Djuanda masuk di *Technische Hoge School* dan memilih jurusan *Wegen en Waterbouwkunde* atau jurusan teknik pengairan dan jalan pada 2 Juli 1929.¹⁷ Djuanda sangat beruntung mampu kuliah di perguruan tinggi *Technische Hoge School*, karena tidak banyak mahasiswa pribumi yang mampu kuliah di THS.

Djuanda memiliki bekal yang baik dalam memulai kuliah di THS, karena menguasai ilmu pasti dan mampu berbahasa Belanda, Perancis, Jerman, serta Inggris dengan baik. Prestasi yang didapat Djuanda ketika sekolah di *Hogere Burger School* membuat Djuanda mendapatkan beasiswa dari pemerintah sebesar f 1000 setahun (f : Gulden).¹⁸ Beasiswa yang diperoleh Djuanda sangat meringankan beban orang tuanya. Dengan beasiswa yang diperoleh, Djuanda mampu membeli buku dan memenuhi keperluan sehari-harinya sebagai mahasiswa di THS.

Semasa Djuanda menjadi mahasiswa di *Technische Hoge School*, telah terjadi banyak pergerakan nasional disebabkan adanya sumpah pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga pemuda dan rakyat pribumi melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu kota yang banyak terjadi perlawanan secara politik melalui partai dan organisasi adalah kota Bandung. Pergerakan nasional juga merambat di *Technische Hoge School*, karena terdapat salah satu alumni *Technische Hoge School* yang merupakan orator ulung dan disegani di kalangan pemuda masa itu, yaitu Soekarno.

Organisasi perlawanan mulai masuk di *Technische Hoge School*, namun pada awalnya sudah ada organisasi buatan Belanda yaitu *Bandung Studenten Club* atau Organisasi Mahasiswa Bandung yang diperuntukan untuk menghimpun semua mahasiswa yang berasal dari

keturunan Belanda, Cina, dan Indonesia. Semenjak maraknya pergerakan nasional menentang Pemerintahan Hindia Belanda, mulai ada saingan organisasi yang di khususkan untuk mahasiswa pribumi, yaitu *Indonesische Studenten Vereniging* atau perkumpulan Mahasiswa Indonesia.¹⁹ Sehingga Djuanda dan mahasiswa Indonesia lainnya berpindah untuk ikut dalam organisasi yaitu *Indonesische Studenten Vereniging*.

Djuanda menyelesaikan studinya selama 4 tahun di *Technische Hoge School* dengan prestasi yang baik karena mendapatkan rata-rata nilai yang memuaskan. Nilai rata-rata ujian Djuanda tahun akademi I tahun 1929/1930 yaitu 6.50, tahun II dengan rata-rata 6.54, Tahun III rata-rata nilai 6.58 dan tahun IV dengan nilai rata-rata 6.55. Nilai rata-rata Djuanda yang terus meningkat membuat Djuanda merupakan salah satu mahasiswa lulusan terbaik *Technische Hoge School* dan mendapatkan gelar insinyur ketika berumur 22 tahun dan lulus pada tanggal 6 Mei 1933.²⁰

c. Direktur, Guru, dan Paguyuban Pasundan

Setelah menyelesaikan studi di *Technische Hoge School*, Ir. Djuanda menyunting Julia Virzsia untuk menjadi istri. Julia Virzsia merupakan guru muda Taman Kanak-Kanak yang di pimpin oleh Raden Wargadibrata yang merupakan ayah Julia Virzsia.²¹

Ir. Djuanda mengawali karir ketika Hindia Belanda mengalami krisis moneter sejak tahun 1930. Ir. Djuanda dan teman-teman seperjuangannya sulit mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sempit imbas dari kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda yang mengurangi pekerja terutama bagi orang pribumi. Sekolah negeri ditutup, jumlah pegawai dikurangi, gaji pekerja diturunkan sehingga membuat banyak pengangguran di Hindia Belanda tahun 1933.

Keadaan krisis tersebut membuat Ir. Djuanda pergi merantau ke Batavia (Jakarta), mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Raden Kartawidjaya selain menjadi mantri guru juga merupakan aktivis dan pengurus Muhammadiyah di Tasikmalaya. Sehingga mengusulkan agar Ir. Djuanda melamar pekerjaan di *Algemene Middbare School* atau AMS Muhammadiyah, sekolah setara SMA. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang diasuh oleh perkumpulan Muhammadiyah dan bertempat di Jl Kramat No. 47 Jakarta.²²

Djuanda mampu diterima di *Algemene Middbare School* Muhammadiyah pada tahun 1933 dan setahun setelahnya menjadi direktur di *Algemene Middbare School* Muhammadiyah. Selain dukungan dari keluarga, adanya bantuan dari Otto Iskandar Dinata yang merupakan tokoh penting di Muhammadiyah waktu itu. Otto Iskandar Dinata merupakan anggota Volksraad (Dewan Rakyat) dan anggota Peguyuban Pasundan. Otto memberikan surat rekomendasi kepada pihak *Algemene Middbare School*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Majalah Media Keuangan Vol X No. 97.*op.cit.* hlm. 18

¹⁷ Kemensos RI. *op.cit.* hlm. 106.

¹⁸ I.O. Nanulaita. *op.cit.* hlm. 22

¹⁹ Awaloedin Djamin. *op.cit.* hlm. 27

²⁰ *Ibid*

²¹ Kemensos RI. *op.cit.* hlm.107

²² Awaloedin Djamin. *op.cit.* hlm. 34

Muhammadiyah akan kecerdasan dan ketekunan Djuanda agar bisa mengajar di *Algemene Middbare School* Muhammadiyah.

Pergerakan nasional semakin semarak untuk menentang Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga membuat Pemerintahan Hindia Belanda khawatir akan perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah pribumi. Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *Toezichtordonnantie* atau lebih dikenal *Wilde Scholen Ordonansi* (pengawasan sekolah liar).²³ Adanya peraturan perundang-undangan baru ini mengakibatkan tidak diperbolehkannya izin membuat sekolah baru yang didirikan swasta, membuat kebijakan ini di tentang oleh sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh pribumi salah satunya *Algemene Middbare School* Muhammadiyah.

Ir. Djuanda mendaftarkan diri untuk masuk di organisasi pergerakan nasional yaitu Paguyuban Pasundan tahun 1934. Ir. Djuanda diangkat sebagai Sekretaris II untuk mendampingi Otto Iskandar yang menjabat Ketua Umum Paguyuban Pasundan.²⁴ Selama menjabat sekretaris di Paguyuban Pasundan membuat perhatian Ir. Djuanda terhadap masalah kemanusiaan di bangsanya menjadi lebih luas. Ir. Djuanda memiliki pemikiran evolusioner yang ingin merubah keadaan bangsanya secara bertahap namun pasti, sehingga dapat dilihat dari beberapa tindakannya selama mengawali karir setelah lulus dari *Technische Hoge School*.

Ir. Djuanda menjabat sebagai Direktur dan guru selama lima tahun di *Algemene Middbare School* Muhammadiyah. Ir. Djuanda menyerahkan posisinya di *Algemene Middbare School* Muhammadiyah untuk diberikan kepada pejabat yang baru, karena kondisi ekonomi kembali membaik sehingga terbuka peluang untuk bekerja di pemerintahan pada tahun 1939. Ir. Djuanda melamar ke pemerintahan dan diterima bekerja di bidang teknologi pengairan, *Provinciale Waterstaat* (Jawatan Pengairan Propinsi Jawa Barat), *Departement Verkeer en Waterstaat* (Dep. Pekerjaan Umum) yang berkantor di gedung *V en W* atau sekarang dikenal dengan gedung Sate.²⁵

d. Djuanda dan Nasionalisme

Nasionalisme adalah kesadaran kesetiaan individu yang bernegara atau semangat bernegara dalam membela negaranya.²⁶ Paham kebangsaan tersebut merupakan pengaruh dari negara Eropa yang di bawa oleh pelajar Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan. Perkembangan paham nasionalisme di Indonesia dengan mewujudkan rasa cinta tanah air memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda dari setiap Individu.

Perkembangan paham nasionalisme di Indonesia diakibatkan reaksi yang timbul karena adanya penjajahan kolonial sehingga terjadi perlawanan-perlawanan di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia berkembang pada abad XX ketika adanya perlawanan di setiap daerah pasca penaklukan Belanda.²⁷

Masa pergerakan nasional merupakan puncak dari perkembangan paham nasionalisme di Indonesia, dengan banyak mempengaruhi pemuda dan cendekiawan Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi pertama pelopor paham nasionalisme di Indonesia yang menginginkan kemerdekaan namun melalui jalur politik. Organisasi sosial dan politik mulai bermunculan pada abad XX dengan semakin berkembangnya paham nasionalisme meskipun cara dalam memperjuangkan kemerdekaan berbeda namun hakikatnya merupakan cerminan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya.

Djuanda merupakan sosok yang dikenal non partai ketika menjabat Menteri dan Perdana Menteri di Pemerintahan Indonesia. Non partai bukan dalam artian Djuanda tidak melakukan kegiatan politik, akan tetapi tetap melakukan kegiatan politik namun tidak terpengaruh oleh partai tertentu atau *independent*. "Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan politik merupakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan."²⁸

Paham nasionalisme dikenal Djuanda ketika kuliah di *Technische Hoge School* Bandung. Djuanda terpengaruh akan paham nasionalisme dari Ir. Soekarno yang kala itu menjadi aktivis pergerakan nasionalisme dengan pidato nasionalisme yang mempengaruhi mahasiswa THS termasuk Djuanda. Kemudian Djuanda mengembangkan paham nasionalisme pada dirinya ketika beliau menjadi anggota Paguyuban Pasundan pimpinan Oto Iskandar di Nata.²⁹

Nasionalisme menurut Djuanda merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan serta kekuatan untuk bersatu membangun Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Adanya nasionalisme membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat menghadapi permasalahan apapun. IDjuanda selalu mengingatkan akan persatuan bangsa dan selalu mengingatkan akan pengorbanan dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia setiap Djuanda melakukan pidato.

Bukti akan kesetiaan Ir. Djuanda kepada negara Indonesia yaitu ketika menolak ajakan Belanda untuk membentuk negara Pasundan saat Indonesia mengalami serangan Agresi Militer pada tahun 1948.³⁰ Perjuangan

²³ Tim Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2009). hlm. 197

²⁴ Pringgodigno. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Rakyat. 1950) hlm. 152

²⁵ I.O. Nanulaita. *op.cit*. hlm. 37

²⁶ Nazaruddin Sjamsudin. *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. (Jakarta : Rajawali Press, 1988) hlm. 37

²⁷ Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional dari Kolonial sampai Kemerdekaan*. (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2008), hlm. 5

²⁸ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : Grasindo, 1992) hlm : 11

²⁹ Suharto. *op.cit*. hlm.53.

³⁰ *Ibid*

dan pengorbanan Ir. Djuanda yang merupakan nasionalis, akan kesetiannya terhadap negaranya, beliau tidak pernah menolak tugas dari negara yang ditujukan pada dirinya walaupun harus meninggalkan keluarganya. Hingga akhir hayat Ir. Djuanda tetap betugas walaupun dalam keadaan sakit, dan meninggal sebagai pahlawan Indonesia dengan semua perjuangannya dan pengorbanannya dalam membangun negara Indonesia.

B. Menteri Ir. Djuanda

a. Ir. Djuanda Pasca Kemerdekaan

Ir. Djuanda berhasil merebut kantor kereta api dari tangan Jepang pada September 1945.³¹ Ir. Djuanda merupakan pemimpin gerakan merebut kantor kereta api dari tangan Jepang pasca di proklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno. Semangat juang Ir. Djuanda beserta pemuda Bandung yang kala itu berhasil menguasai dan merebut kantor kereta api dari penguasaan Jepang. Usaha perlawanan Ir. Djuanda mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia skarena belum ada yang menempati posisi Ketua Djawatan Kereta Api sejak tahun 1945, sehingga pemerintah mengangkat Ir. Djuanda sebagai ketua Djawatan Kereta Api 31 Januari 1946 dalam Maklumat Kementerian Perhubungan No./KA tanggal 23 Januari 1946.³²

Pelantikan Ir. Djuanda dilakukan secara tidak resmi, hanya melalui Maklumat Kementerian Perhubungan No./KA tanggal 23 Januari 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Ir Soekarno, sehingga seketika itu Ir. Djuanda langsung bergabung dengan staff DKA lainnya yang berada di Bandung. Namun, terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946 mengakibatkan pengosongan rumah dan kantor dinas serta pengungsian massal yang terjadi di Bandung.³³ Adanya kejadian tersebut membuat kantor DKA yang baru beroperasi berpindah tempat ke Cisarupan Jawa Barat.

Tugas berat menanti Ir. Djuanda untuk melakukan revolusi di bidang kereta api dengan berawal memperbaiki fasilitas, stasiun, dan perumahan bagi karyawan DKA serta gerbong-gerbong kereta api yang sudah tak layak pakai. Revolusi pengadaan lokomotif kereta api yang di program oleh Djawatan Kereta Api dengan melakukan perbaikan kembali untuk jalur kereta api yang sudah dibongkar Jepang antara lain, Pengandaran-Cijulang 22 km, Purwosari-Kartosuro 12 km, Purwodadi-Ngemplak 10 km, Kutoarjo-Purworejo 12 km, Kudus-Bangkalan 24 km, Plumpang-Tuban 22 km, Ponorogo-Slahung 26 km.³⁴

Tanggung jawab yang baik Ir. Djuanda selama menjadi Ketua Djawatan Kereta Api mendapat kepercayaan dari Perdana Menteri Syahrir untuk masuk

kedalam susunan kabinetnya. Ir. Djuanda dilantik menjadi Menteri muda Perhubungan. Ketua Djawatan Kereta Api dan Menteri muda Perhubungan merupakan jabatan rangkap yang dimiliki oleh Ir. Djuanda. Dengan jabatan rangkap tersebut dapat diartikan betapa diakuinya kemampuan Ir. Djuanda untuk dipercaya membangun pemerintahan di Indonesia.

Peran Ir. Djuanda selama menjadi Ketua Djawatan Kereta Api ialah berhasil mengadakan pertemuan antar staf DKA seluruh Jawa yang bertempat di Solo. Kereta Api di pulau Jawa pada masa itu dibagi atas 3 daerah, yaitu di Jawa Barat merupakan DKA bekas SS (*Staatsspoor*-DKA Hindia Belanda), Jawa Tengah merupakan bekas dari perusahaan kereta api swasta, dan Jawa Timur bekas SS (*Staatsspoor*-DKA Hindia Belanda).³⁵ Ketiga daerah tersebut memiliki masalah masing-masing dan masih bekerja sendiri tanpa melakukan kerjasama antara satu DKA daerah dengan DKA daerah lain sehingga mengalami permasalahan terutama di bidang bahan bakar kereta api. Salah satu permasalahan tersebut yang dibahas sehingga setelah rapat selesai menghasilkan keputusan untuk saling membantu dalam pembangunan kereta api Indonesia khususnya di Jawa.

b. Djuanda dalam Masa Pembangunan Bangsa

Kabinet Syahrir III terbentuk setelah kembalinya PM Syahrir setelah diculik oleh kelompok oposisi sehingga Ir. Soekarno kembali memberikan mandat kepada Syahrir untuk membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Syahrir III.³⁶ Dalam kabinet tersebut, Ir. Djuanda mendapat tugas sebagai Menteri Perhubungan seperti masa Kabinet Syahrir II.

Sebagai Menteri Perhubungan, Ir. Djuanda terus melakukan pembangunan di segala bidang transportasi. Setelah memperbaiki dan membangun transportasi darat terutama kereta api, Ir. Djuanda segera membangun pelayaran laut yang merupakan transportasi penting selain kereta api. Terjadinya permasalahan di bidang pelayaran membuat transportasi laut tidak berkembang. Walaupun pemerintah sudah membentuk Djawatan Oeroesan Laoet Seloeroeh Indonesia (DJOLSI) tetap perkembangan transportasi laut tidak bisa berkembang.³⁷

Tidak berkembangnya transportasi laut membuat Ir. Djuanda mulai memprioritaskan pembangunan di bidang transportasi darat. Terjadi perbaikan dan pembangunan fasilitas untuk transportasi darat yaitu dengan pengadaan dan perbaikan gerbong baru untuk transportasi kereta api, membuat dan memperbaiki jalur

³¹ Soedarman. *Jejak-Jejak Pahlawan : Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*. (Jakarta : PT Grasindo, 2006), hlm. 63.

³² M.Gani. *Kereta Api Indonesia*. (Jakarta : Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1978), hlm 57

³³ Tim Penulisan Sejarah Indonesia. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. (Jakarta : Balai Pustaka. 2009). hlm. 192

³⁴ M.Gani. *op.cit.* hlm. 58

³⁵ M. Gani. *op.cit.* hlm. 97

³⁶ Bibit Suprpto. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 50

³⁷ Djalal Hasjim. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. (Bandung : Binacipta,1979), hlm. 59

rel kereta api baru, serta membangun kembali stasiun kereta api dan jalan raya untuk transportasi darat lainnya.

Pembangunan fasilitas yang menunjang untuk transportasi darat mengalami permasalahan ketika adanya pemberontakan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tidak setuju akan penandatanganan perjanjian Linggarjati yang dilakukan oleh PM Syahrir karena menguntungkan Belanda. Adanya kejadian itu menghambat pembangunan fasilitas penunjang transportasi darat. Tidak hanya terjadi pemberontakan ketika masa kabinet Syahrir III, namun adanya perpecahan antar anggota kabinet membuat PM Syahrir mengundurkan diri dan pemerintahan kembali dipegang kendali oleh Presiden pada tanggal 27 Juni 1947.³⁸

Ir. Djuanda dalam kabinet Amir Syarifuddin dipercaya kembali sebagai Menteri Perhubungan hingga dua periode dari Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Syarifuddin II. Kepercayaan tersebut merupakan bukti akan kapabilitas dan kualitas tanggung jawab pekerjaan Ir. Djuanda yang sangat baik. Ir. Djuanda juga merupakan orang yang non partai atau tidak tergolongkan dari partai tertentu baik Masyumi, Sosialis, bahkan Komunis.

Kabinet Amir Syarifuddin II mengalami permasalahan dalam melakukan perundingan *Renville* yang merupakan perjanjian “persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dan 6 pokok prinsip untuk perundingan bertujuan mencapai penyelesaian politik”.³⁹ Kabinet Amir Syarifuddin II dianggap gagal dalam perjanjian *Renville* sehingga melalui Maklumat Presiden RI Nomor 2 Tahun 1948 tertanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

Presiden Ir. Soekarno memberikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh Hatta untuk memimpin kabinet baru pada tanggal 24 Januari 1948 untuk menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin II. Ir. Djuanda dalam Kabinet Hatta dilantik kembali menjadi Menteri Perhubungan.

Ir. Djuanda menjadi delegasi Indonesia dalam perjanjian dengan Belanda. Ir. Djuanda ikut dalam delegasi perjanjian *Renville* dan Kaliurang walaupun dalam kedua perjanjian tersebut Indonesia masih belum bisa terlepas dari belenggu Belanda. Masalah pada masa kabinet Hatta tidak hanya berasal dari luar negeri namun di dalam negeri yaitu berupa pemberontakan ideologi komunis yang dilakukan oleh pihak PKI Madiun yang dipimpin Musso.

Kabinet Hatta mengalami *reshuffle* dan Ir. Djuanda dipercayai untuk menjadi Menteri Negara sejak 4 Agustus 1949.⁴⁰ Dalam Kabinet Hatta II terjadi perjanjian penting antara Indonesia dengan Belanda, yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar (KMB) diwakili oleh beberapa delegasi dari Indonesia seperti Ir. Djuanda yang mewakili delegasi komisi ekonomi dan keuangan. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya

terbentuknya kerja sama antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Uni Indonesia-Belanda dan diketuai oleh ratu Belanda. Keputusan lainnya adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai pemerintahan baru sehingga terjadi *reshuffle* kembali dalam tubuh Kabinet Hatta II dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Kabinet Hatta III menunjuk Ir. Djuanda untuk dilantik sebagai Menteri Kemakmuran di bidang ekonomi rakyat atas dasar keberhasilannya mewakili delegasi komisi ekonomi dan keuangan dalam perundingan di Konferensi Meja Bundar.⁴¹ Kabinet Hatta III menerima penyerahan kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949.

c. Djuanda dalam Politik Indonesia

Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan sebuah pemerintahan hasil dari kesepakatan dalam perundingan KMB. Beban berat dipundak Ir. Djuanda karena harus mampu mengemban tanggung jawab untuk menjaga stabilisasi ekonomi negara dan bangsa. Ir. Djuanda merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang sedikit mengenai ekonomi karena bukan latar belakang pendidikannya, namun dengan kegigihannya Ir. Djuanda mampu menjalankan tugas sebagai Menteri Kemakmuran bidang ekonomi.

Ir. Djuanda segera melakukan tindakan atas dampak yang timbul akibat terjadinya agresi militer Belanda I dan II. Dampak dari agresi militer menyebabkan rusaknya berbagai fasilitas bangsa yang hancur dan adanya inflasi serta defisit dalam anggaran belanja negara.⁴² Tindakan yang dilakukan Ir. Djuanda untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk organisasi yang membantu Menteri Kemakmuran dengan anggota para ahli ekonomi. Ir. Djuanda melakukan kegiatan politik ekonomi terhadap keputusan dalam KMB.

Perubahan pemerintahan dari RIS ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat rakyat merasa menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga terjadi pemogokan massal yang dilakukan buruh diberbagai perusahaan asing di Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan goyahnya stabilitas ekonomi Indonesia yang baru tersusun, karena kebijakan ekonomi Indonesia bergantung akan adanya pabrik dan perusahaan asing di Indonesia guna membentuk perekonomian Indonesia yang masih baru. Dalam mengatasi hal ini, Ir. Djuanda meminta bantuan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono untuk menjamin ekspor hasil perkebunan agar stabilisasi ekonomi Indonesia tetap terjaga. Selain itu perusahaan asing yang masih berdiri akan kenakan pajak 40% dari hasil keuntungan. Setelah berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia, Ir. Djuanda ditunjuk kembali untuk menjadi Menteri Perhubungan dan Pengangkutan di Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo tahun 1950 dan 1953.

Sebagai Menteri Perhubungan, Ir. Djuanda berusaha melakukan pengembangan transportasi Udara. Pengembangan transportasi udara memiliki hambatan seperti transportasi laut yaitu kurangnya SDM dan fasilitas

³⁸ Bibit Suprpto. *Op.cit.* hlm. 59

³⁹ Panitia Penulisan Sejarah Dep Luar Negeri. (Jakarta : Departemen Luar Negeri) hlm. 33

⁴⁰ Bibit Suprpto. *op.cit.* hlm. 95

⁴¹ I.O. Nanulaita. *op.cit.*, hlm. 107

⁴² Tim Penulisan Sejarah Indonesia VI. *op.cit.* hlm.302

yang memadai sehingga Menteri Perhubungan Ir. Djuanda melakukan diplomasi kepada perusahaan Belanda KLM-Interinsular. Ir. Djuanda berharap adanya kerja sama antar pihak dan melakukan *merger* sehingga dapat membentuk suatu bidang yang menaungi transportasi udara. Keinginan tersebut akhirnya terealisasi, dengan saham 50% Pemerintah Indonesia dan 50% KLM-Interinsular dapat membangun perusahaan transportasi udara yang dikenal sebagai NV. Garuda Indonesia Airways (GIA) pada tanggal 27 Desember 1949 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1950.⁴³

Ir. Djuanda telah berhasil mendirikan perusahaan transportasi udara *Garuda Indonesia Airways*, dan memfokuskan melakukan pembenahan fasilitas pelayaran karena pelayaran merupakan transportasi penting di negara kepulauan Indonesia. Pelayaran Indonesia pada masa pemerintahan RIS dikuasai oleh perusahaan pelayaran yang berasal dari Belanda yaitu *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Perusahaan ini memanfaatkan kedudukannya untuk memonopoli pelayaran di Indonesia. Ir. Djuanda berusaha untuk bisa menasionalisasikan KPM namun tidak bisa teralisasi karena di Indonesia sendiri masih kurang akan ketenagakerjaan yang mampu dalam bidang pelayaran.

Transportasi laut di Indonesia merupakan transportasi penting bagi Indonesia karena guna memperdekat jarak antar pulau di Indonesia dengan adanya transportasi laut. Atas dasar itu Ir. Djuanda berusaha untuk merealisasikan pembentukan badan transportasi laut Indonesia. Transportasi laut mulai berkembang dengan berdirinya Badan Pengusahaan Pusat Kapal-Kapal atau PAPUSKA pada tanggal 17 Agustus 1950.⁴⁴ PAPUSKA mendapatkan modal awal dari pemerintah melalui Menteri Perhubungan Ir. Djuanda berupa 8 Unit kapal untuk bisa bersaing dengan perusahaan pelayaran Belanda KPM di Industri Pelayaran di Indonesia. PAPUSKA tidak mampu bersaing dengan KPM karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang memadai sehingga pemerintah membubarkan PAPUSKA dan mendirikan PT PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) pada tanggal 20 Juni 1952.⁴⁵

Modal yang digunakan Menteri Perhubungan Ir. Djuanda dalam melakukan revolusi di bidang transportasi merupakan hasil dari perdagangan karet dan peminjaman dari Eximbank yang merupakan bank yang berasal dari Amerika. Selain itu keberhasilan Ir. Djuanda dalam melakukan diplomasi kerja sama perdagangan dengan negara Asia maupun Eropa membantu pembiayaan dan modal awal dalam pembangunan berbagai sektor transportasi di Indonesia.

Kabinet Wilopo dibubarkan Presiden Ir. Soekarno dan itu merupakan masa akhir jabatan Ir. Djuanda sebagai Menteri Perhubungan. Ir. Djuanda tidak lagi menjabat di kementerian pada tanggal 30 Juli 1953. Berakhirnya jabatan Ir. Djuanda sebagai menteri Perhubungan tidak mengakhiri peran Ir. Djuanda dalam revolusi Indonesia sebagai negara merdeka. Ir. Djuanda tetap bekerja di pemerintahan yaitu bekerja sebagai Direktur Biro Perancangan Negara.

Direktur Biro Perancangan Negara bertugas untuk melakukan pembangunan dan pembenahan bangsa berupa proyek-proyek fasilitas bagi masyarakat, pembangunan pertanian irigasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Ir. Djuanda melakukan tugas awalnya dengan *blusukan* ke daerah-daerah terutama di luar pulau Jawa untuk melakukan sosialisasi akan proyek pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah.

Program Ir. Djuanda dalam perencanaan negara lebih memfokuskan pada pembenahan dan pembangunan desa. Menurut Ir. Djuanda dalam mengawali pembangunan di Indonesia mulai dari masyarakat desa. Untuk melaksanakan program tersebut, Ir. Djuanda mengundang ahli bidang *Community Development* PBB yaitu D.K. Dey.

Prinsip *Community Development* merupakan pembangunan yang dilakukan dari bawah untuk memberikan kemakmuran masyarakat dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa.⁴⁶ Ir. Djuanda berpendapat bahwa kekuatan pembangunan Indonesia berawal dari pembangunan masyarakat desa. Masyarakat desa merupakan penunjang ekonomi Indonesia dengan komoditi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat desa sendiri seperti padi yang membentang luas di daerah-daerah desa di Indonesia dan pernah menjadi komoditi ekspor sehingga dikenal sebagai negara agraris.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, Ir. Djuanda dan para staf berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960).⁴⁷ Rencana pembangunan ini masih dalam kajian pemerintah serta adanya gejolak politik di kubu pemerintahan pasca pemilu 1955 sehingga membuat pembangunan masyarakat desa belum terealisasi dan baru teralisasi dalam Undang-Undang tanggal 11 November 1958 serta mengubah sasaran dan prioritasnya menjadi tahun 1957 yang sebelumnya 1956.⁴⁸

C. Perdana Menteri Ir. Djuanda

a. Awal Pembentukan Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda terbentuk setelah *demisioner* Kabinet Ali Sastroamijoyo. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda menjadi Direktur Biro

⁴³ A.B. Lopian. *Terminologi Sejarah : 1945 – 1950 & 1950 – 1959*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996) hlm. 168

⁴⁴ Husni Lain. *Mengenai Maritim Angkutan Laut*. (Jakarta : Yayasan Bina Maritim, 1988), hlm. 97

⁴⁵ www.pelni.co.id (diakses tanggal 21 Februari 2017)

⁴⁶ Randy Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan : sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm 74

⁴⁷ UU RI Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

⁴⁸ Tim Penulisan Sejarah Indonesia. *op.cit.* hlm.

Perencanaan Negara dan berhasil merumuskan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan negara tidak mampu direalisasikan karena pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo terjadi gejolak politik dan menimbulkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Pemberontakan daerah masa Kabinet Ali Sastroamijoyo diakibatkan adanya pengunduran diri dari Wakil Presiden Moh Hatta. Mundurnya Moh Hatta sebagai Wakil Presiden tidak direstui oleh para pemimpin daerah diluar Jawa sehingga terjadi ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Wakil Presiden Moh Hatta mundur mengakibatkan tidak ada lagi politik Dwi Tunggal sehingga membuat Ir. Soekarno tidak memiliki mitra dengan intelektual yang sepadan.⁴⁹

Kabinet Ali Sastroamijoyo semakin suram ketika Presiden mengeluarkan kebijakan yang disebut Konsepsi Presiden yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 1957.⁵⁰ Adanya Konsepsi Presiden mengakibatkan perpecahan di kalangan anggota partai politik yang berada dalam kabinet Ali Sastroamijoyo. Sehingga terjadi penarikan anggota kabinet yang dilakukan partai politik terutama partai Masyumi dan PSII. Keretakan kabinet Ali Sastroamijoyo mengakibatkan jatuhnya kabinet tersebut dan Ali Sastroamijoyo memberikan mandatnya kepada Presiden tanggal 14 Maret 1957.

Rapat tertutup digelar untuk menentukan kabinet pengganti Ali Sastroamijoyo dan berakhir dengan usulan Ali Sastroamijoyo yang mengusulkan Ir. Djuanda untuk dipilih memimpin kabinet baru.⁵¹ Ali Sastroamijoyo memilih Ir. Djuanda karena Ali Sastroamijoyo pernah bekerja sama dengan Ir. Djuanda semasa Ali Sastroamijoyo menjadi Perdana Menteri. Etos kerja Ir. Djuanda yang baik dan bertanggung jawab dibuktikan dengan berhasil merumuskan Rencana Pembangunan Lima Tahun saat Ali Sastroamijoyo menjadi Perdana Menteri. Penyebab lain terpilihnya Ir. Djuanda karena beliau merupakan orang yang tidak memiliki partai dan bekerja dengan kehendak sendiri tanpa terpengaruh oleh partai.

Hasil rapat tertutup tersebut akhirnya direalisasikan oleh Presiden dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri pada tanggal 9 April 1957 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 1957.⁵² Penunjukkan Ir. Djuanda mendapat dukungan dari beberapa pihak terutama dikalangan mantan Perdana Menteri yang pernah bekerja dengan Ir. Djuanda sehingga Ir. Soekarno juga mempercayakan Menteri Pertahanan kepada Ir. Djuanda. Karakter kepemimpinan dan hasil kerja Ir. Djuanda yang memuaskan merupakan salah satu faktor eksternal pemilihan Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri. Faktor internal pemilihan Ir. Djuanda dikarenakan adanya Konsepsi

Presiden yang akan merubah sistem Demokrasi Perlementer menjadi Sistem Demokrasi Terpimpin sehingga membutuhkan Perdana Menteri yang tidak berpartai agar tidak ada gesekan politik dan sesuai keinginan Presiden.

Kabinet Djuanda disebut dengan kabinet ahli atau *zeken kabinet* karena anggota kabinetnya terdiri dari para ahli dibidang masing-masing. Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir masa Parlementer dan Demokrasi Liberal, selain itu Kabinet Djuanda merupakan kabinet terlama yang berkuasa di pemerintahan Indonesia dengan rentan waktu 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959.

b. Kebijakan Ir. Djuanda dalam Program Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda memulai aktif pada tanggal 9 April 1957 setelah Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 1957 ditetapkan. Kabinet Djuanda merupakan kabinet ekstra parlementer sehingga kedudukannya dalam pemerintah kuat namun harus tunduk kepada Presiden oleh sebab itu Kabinet Djuanda harus mengikuti kehendak Presiden.

Kabinet Djuanda sering disebut *zeken kabinet* atau kabinet ahli karena komposisi anggota dalam kabinet merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Anggota kabinet Djuanda merupakan seseorang yang non partai atau keluar dari partainya sehingga tidak terikat akan suatu partai.⁵³ Program Kabinet Djuanda adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, serta mempergiat pembangunan.

Program kabinet Djuanda segera direalisasikan oleh Ir. Djuanda. Pembentukan Dewan Nasional merupakan tugas pertama dari Kabinet Djuanda. Perdana Menteri Djuanda membentuk Dewan Nasional yang disahkan oleh Undang-Undang Darurat pada tanggal 6 Mei 1957 dan 11 Juli 1957.⁵⁴ Berdirinya Dewan Nasional merupakan awal dari penerapan Demokrasi terpimpin yang sesuai dengan rencana Konsepsi Presiden. Namun menurut Ir. Djuanda, Dewan Nasional dibentuk untuk menjadi penasihat pemerintahan sehingga tidak ada perubahan dalam konstitusi dan kabinet tetap menjadi tanggung jawab Parlemen.⁵⁵ Namun dalam kenyataannya adanya Dewan Nasional membuat Ir. Soekarno semakin leluasa mengatur pemerintahan dan melemahkan fungsi kabinet sendiri.

Tugas Kabinet Djuanda selanjutnya adalah menormalisasi keadaan Republik Indonesia yang pada masa kabinet Ali terjadi gejolak pemberontakan daerah dan mengancam keutuhan NKRI atau disintegrasi. Permasalahan yang dihadapi Ir. Djuanda merupakan tinggalan dari Kabinet Ali seperti adanya pemberontakan

⁴⁹ Suwarno. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. (Yogyakarta : Ombak, 2012). hlm. 63

⁵⁰ Tim Penulisan Sejarah Indonesia. *op.cit.* hlm.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Bibit Suprpto. *Loc.cit.* hlm. 190

⁵³ Moedjanto. *Indonesia Abad Ke-20*. (Jogjakarta : Kanisus, . 1988), hlm. 104

⁵⁴ I.O. Nanulaita. *op.cit.* hlm. 137

⁵⁵ *Ibid*

daerah. Masalah pemberontakan daerah menurut keterangan Ir. Djuanda dalam koran *Java Bude* tanggal 10 April 1957 menerangkan bahwa:

“Masalah pemberontakan ini bahkan lebih sulit dibandingkan dengan Kabinet Presiden di Yogyakarta pada tahun 1948 selama pemberontakan Madiun, bahwa kesulitan saat ini dibentuk secara substansial dengan tiga isu, isu tersebut adalah masalah administrasi dan masalah keuangan dan ekonomi. Ir. Djuanda juga menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa ide untuk menyelesaikan isu-isu daerah namun saat ini ia tidak bersedia untuk membuat pernyataan apapun tentang masalah tersebut (Koran *Java Bude*, Tanggal 10 April 1957).”⁵⁶

Keterangan dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ir. Djuanda merasa bahwa masalah disintegrasi ini penanganannya lebih sulit dari pada masalah pemberontakan di Madiun tahun 1948. Masalah pemberontakan daerah yang terjadi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakpuasan pemerintahan daerah dengan pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat sehingga timbullah pemberontakan. Ir. Djuanda sudah merencanakan cara untuk meredam pemberontakan tersebut namun masih belum terealisasi.

Program Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan normalisasi keadaan Republik Indonesia akan dimulai dengan mengadakan Musyawarah Nasional yang bekerja sama dengan Dewan Nasional.⁵⁷ Musyawarah Nasional akan diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan ditentukan pada bulan September 1957. Musyawarah Nasional mengundang mantan Wakil Presiden RI Moh Hatta dengan mengutus Dr. J. Leimena untuk menemuinya.⁵⁸

Musyawarah Nasional merupakan program yang tidak tertulis dalam Kabinet Djuanda namun kegiatan tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk melakukan diskusi dengan para tokoh mengenai keadaan darurat Republik Indonesia. Kegiatan Musyawarah Nasional merupakan langkah tepat yang dilakukan semasa Kabinet Djuanda karena bisa menyatukan Indonesia kembali melalui politik Dwi Tunggal. Namun jika Musyawarah Nasional tersebut gagal akan berdampak buruk pada persatuan Indonesia dan akan terjadi pergolakan serta perpecahan. Pidato Ir. Djuanda dalam mengawali Musyawarah Nasional, menerangkan bahwa:

“Betapa Penting Musyawarah Nasional diadakan pada waktu ini, mengingat kepentingan Negara dan

Bangsa yang sudah sangat mendesak karena terjadinya tindakan-tindakan simpang siur yang amat mempengaruhi masyarakat dan negara kita, dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kejadian-kejadian yang tidak normal di negara kita akhir-akhir ini perlu segera dipecahkan dan dicarikan jalan penyelesaiannya sehingga keadaan Republik Indonesia normal kembali. Dalam hal ini Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan Musyawarah Nasional ini kita akan dapat membuka jalan guna mengatasi persoalan-persoalan dan kesukaran-kesukaran karena para peserta ikhlas datang ke tempat musyawarah untuk sama-sama menghadapi dan menyelesaikan bahaya yang mengancam kita bersama di mana akan tidak terjadi pendiktean oleh sesuatu pihak terhadap yang lainnya, terdapat curiga-mencurigai satu sama lain dan tidak akan saling tuduh menuduh siapa yang bersalah. Musyawarah Nasional adalah gelanggang persaudaraan serta keutuhan dan diatas semuanya ini Proklamasi 17 Agustus 1945”⁵⁹

Dalam Musyawarah tersebut Ir. Djuanda menerangkan bahwa terdapat empat pokok acara yang akan dibahas dalam musyawarah, yaitu meliputi persoalan militer, sipil, kewaspadaan nasional, dan soal-soal khusus termasuk masalah Dwi Tunggal dan Irian Barat.”⁶⁰

c. Kebijakan Ir. Djuanda dalam Pergolakan Politik

Program Kabinet Djuanda poin keempat mengenai perjuangan Irian Barat dilaksanakan selepas adanya keputusan Munas. Kebijakan Perdana Menteri Djuanda dalam memperjuangkan Irian Barat di bawa dalam rapat PBB dan mendapat dukungan penuh dari Presiden dan Dewan Nasional.⁶¹ Perdana Menteri Djuanda berharap mendapatkan dukungan dari negara koalisi Indonesia karena pada masa-masa sebelumnya Ir. Djuanda sering melakukan Hubungan Internasional dengan negara lain sehingga memiliki hubungan Diplomatik yang baik.

Ir. Djuanda kembali mendapatkan tugas berat setelah adanya percobaan pembunuhan Presiden. Percobaan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 30

⁵⁶ Baca Koran *Java Bude*, Tanggal 10 April 1957, hlm 1

⁵⁷ Bibit Suprpto. *op.cit.* hlm. 196

⁵⁸ I.O. Nanulaita. *loc.cit.* hlm. 139

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Zulfikar Gazali, Anhar, Jr. Chaniago. *Sejarah Politik Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1989). hlm. 52

⁶¹ Moedjanto. *op.cit.* hlm. 108

November 1957, ketika Ir. Soekarno sedang melakukan kunjungan ke sekolah anaknya di Cekini, Jakarta. Granat-granat yang dilemparkan ke arah Ir. Soekarno meledak sehingga menewaskan beberapa siswa dan wali murid. Namun, kejadian tersebut tidak melukai Ir. Soekarno yang masih sempat menghindar.⁶²

Adanya peristiwa tersebut membuat Ir. Djuanda mengkhawatirkan hasil dari Munas tidak akan terealisasi karena suhu politik di Indonesia semakin meningkat. Terlepas dari itu, Ir. Djuanda tetap melakukan tugasnya dan mengeluarkan kebijakan untuk pemogokan umum seluruh buruh di Indonesia selama 24 jam terhadap perusahaan milik Belanda pada tanggal 3 Desember 1957.⁶³ Kebijakan Perdana Menteri Djuanda tersebut merupakan imbas dari adanya kegagalan PBB dalam melakukan perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat.

Kebijakan Ir. Djuanda mengakibatkan kerugian dari perusahaan Belanda mencapai 100 juta Rupiah pada zaman itu. Adanya pemogokan massal tersebut menimbulkan aksi pengambilalihan secara besar-besaran sehingga banyak perusahaan Belanda yang keluar dari Indonesia.⁶⁴ Pengambilalihan perusahaan Belanda dihentikan oleh KASAD dan menyerahkan perusahaan kepada pengawasan tentara.⁶⁵

d. Kabinet Djuanda dalam Mengatasi PRRI-Permesta

Berawal dari adanya perpecahan ditubuh angkatan darat yang terjadi karena ketidakmerataan kesejahteraan tentara Indonesia khususnya diluar Jawa, memicu terjadinya tuntutan perbaikan kesejahteraan prajurit tentara yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin komando di daerah.

Kondisi politik Indonesia yang sedang memanas pasca adanya peristiwa Cekini dan pemogokan massal terhadap perusahaan Belanda dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk melakukan gebrakan politik. Pihak oposisi di daerah Sumatera mengadakan rapat raksasa di Padang, dan menghasilkan:

1. Dalam waktu 5 X 24 jam, sejak dini hari Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau pejabat Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
2. Presiden atau pejabat Presiden memberi tugas kepada Drs. Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai orang-orang yang jujur, berwibawa, cakap, dan bebas dari anasir anti-Tuhan. Tugas dari *zeken kabinet* ialah menyelamatkan negara dari keruntuhan dengan kembali ke Undang-Undang Dasar

Sementara dan meletakkan dasar pembangunan negara.

3. Meminta kepada Drs. Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyediakan diri menolong negara.⁶⁶

Ultimatum tersebut membuat Perdana Menteri Djuanda mengadakan rapat darurat dengan para petinggi negara dan petinggi militer. Rapat mendadak tersebut merupakan respon cepat Perdana Menteri terhadap ultimatum yang ditujukan kepada Kabinetnya dan Pemerintahan Pusat di Jakarta. Hasil dari rapat darurat tersebut meliputi:

1. Pemerintahan pusat menolak ultimatum Letkol Ahmad Husein dengan kawan-kawan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 pasal 1, ayat 2, karena membahayakan keamanan dan keselamatan negara, pemerintah memutuskan untuk membebastugaskan empat perwira dari dinas tentara tidak dengan hormat, yaitu Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkufli Lubis, Kolonel Simbolon, serta Kolonel Dahlan Djambek.⁶⁷

Kesigapan dan reaksi cepat tentara Indonesia berhasil memukul mundur pihak PRRI/Permesta. Selain kesigapan tentara Indonesia, adanya kebijakan dan strategi Perdana Menteri Ir. Djuanda juga berperan dalam melemahkan ekonomi PRRI/Permesta. Kebijakan tersebut adalah kebijakan impor beras yang selama ini di sabotase PRRI untuk membiayai para pihak oposisi.

Pemerintah pusat sebelumnya melakukan impor beras dari Hongkong, Amerika, dan Philipina. Namun jalur yang harus dilewati melalui Singapura merupakan basis besar PRRI sehingga sering beras yang diimpor pemerintah tidak bisa mencapai Jakarta. Beras tersebut di sabotase oleh pihak PRRI dan dijual kembali atau dikonsumsi untuk menghidupi pihak oposisi dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli senjata.⁶⁸

Permasalahan tersebut diketahui Perdana Menteri Ir. Djuanda sehingga kemudian melakukan perubahan kebijakan impor beras dengan menghentikan impor dari Hongkong dan Amerika dengan beralih mengimpor beras dari Rusia (Uni Soviet). Beras dari Rusia (Uni Soviet) dikirim tidak melalui Singapura, namun langsung ke pelabuhan di Indonesia tanpa ada perantara bahkan tidak melalui Jakarta sehingga langsung bisa didistributorkan ke masyarakat.⁶⁹ Kebijakan ini berdampak buruk bagi ekonomi PRRI/Permesta karena tidak ada pemasukan keuangan dan membuat pasukan tentara PRRI/Permesta bisa dilumpuhkan.

⁶² Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 541

⁶³ Tim Kemendikbud. *op.cit.* hlm. 293

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia*. (Jakarta : LP3ES dengan PT New Aqua Press, 1988), hlm. 218

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Baca Majalah *Skets Masa (madjalah lukisan masyarakat)*. No.5-th.II-1 Februari 1959. hlm. 10

⁶⁹ *Ibid*

e. Kebijakan Hukum Laut Perdana Menteri Ir. Djuanda

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sabang hingga Merauke merupakan bukti dari besar dan luasnya negara kepulauan Indonesia. “Indonesia Tanah Airku” penggalan bait pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya, membuktikan bahwa wilayah Indonesia terdiri tanah (pulau) dan air (laut) yang merupakan satu kesatuan utuh dari negara Indonesia. Pulau dan laut merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk menyatukan wilayah Indonesia karena dengan persatuan tersebut akan membentuk suatu wilayah teritorial yang besar dan dapat menyatukan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah memahami hal itu sehingga lahirnya Deklarasi Djuanda merupakan cikal bakal hukum laut di Indonesia.

Pada masa penjajahan, kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai hukum laut untuk membentengi wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1939. Undang-Undang tersebut dituangkan dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* yang dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (*laagwaterlijn*) daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (*grondgebied*) dari Hindia Belanda.⁷⁰

Hukum laut tersebut masih digunakan Indonesia walaupun sudah merdeka. Dalam perkembangannya hukum laut tersebut dirasa kurang sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu yang sedang berjuang untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Hukum laut tersebut perlu dikaji kembali agar bisa menguntungkan Indonesia. Secara politik hukum laut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* merupakan kelemahan Indonesia saat berjuang memperjuangkan Irian Barat karena kapal-kapal Belanda leluasa berlayar melalui laut Indonesia diluar 3 mil. Secara geografis hukum laut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* adalah penyebab kedaulatan Indonesia terpecah karena adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau di Indonesia. Hal tersebut memungkinkan masuknya kapal asing secara bebas di Indonesia.⁷¹

Permasalahan tersebut segera diselesaikan Perdana Menteri Ir. Djuanda merangkap Menteri Pertahanan guna menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur batas wilayah laut dan darat, sehingga menunjuk Mochtar Kusumaatmadja sebagai

ketua panitia Rancangan Undang-undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada tahun 1956.⁷²

Panitia Rancangan Undang-undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim mengusulkan menggunakan konsep *Archipelagic Principle*. Konsep *Archipelagic Principle* merupakan konsep negara kepulauan yang dapat menyatukan lautan dan daratan Indonesia dengan menggunakan metode garis pangkal lurus. Konsep negara kepulauan yang disusun oleh Panitia Rancangan Undang-undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Internasional terhadap kasus sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia tahun 1951.⁷³ Sengketa Inggris dan Norwegia merupakan sengketa batas wilayah laut yang dikenal dengan “*Anglo-Norwegian Fisheries Case*” yang diselesaikan pada tahun 1951.⁷⁴

Perdana Menteri Djuanda tetap memperjuangkan Deklarasi Djuanda walaupun harus menghadapi penolakan dari negara lain. Keputusan tersebut merupakan sesuatu yang tepat karena adanya Deklarasi Djuanda mampu menyatukan wilayah Indonesia dan rakyat Indonesia walaupun terpisah oleh laut. Adanya Deklarasi Djuanda mampu membantu dalam usaha pembebasan Irian Barat dari belunggu Belanda. Sehingga membuat pemerintah menyusun Undang-Undang resmi untuk Deklarasi Djuanda.⁷⁵

f. Perdana Menteri Ir. Djuanda dalam Pergolakan Politik Parlemerter

Adanya gerakan pemberontakan yang dilakukan di daerah, membuat Perdana Menteri Djuanda merasa harus ada peraturan Undang-Undang dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, sehingga kemudian menugaskan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang. Konstituante merupakan suatu badan yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar (Konstitusi).

Perdana Menteri Djuanda mengusulkan untuk adanya kerja sama antara pemerintah dengan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang dasar baru. Perdana Menteri Djuanda mendasari usulan tersebut berdasarkan UUDS pasal 136 tentang keterlibatan Pemerintah dalam memberikan sumbangan usaha dan pikiran untuk membantu tugas Konstituante.⁷⁶

Dalam rapat dengan konstituante tahun 1957, Perdana Menteri Djuanda menyampaikan pidatonya dalam risalah perundingan 1957:

“bertindak dengan ketegasan.....
dengan peninjauan dan penilaian

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut bunga rampai*. (Jakarta : Binacipta, 1978.) hlm. 3

⁷¹ Indien Winarwati. *Konsep Negara Kepulauan*. (Malang : Setara Press, 2016) hlm. 23

⁷² S.K Menteri Pertama Djuanda tanggal 1 Agustus 1957 tentang Panitia Interdepartemental Perancangan Undang-undang tentang Laut Wilayah Indonesia dan Daerah Maritim

⁷³ Indien Winarwati. *loc.cit.* hlm. 73

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. (Bandung : Binacipta. 1986). Hlm. 99

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Undang-undang No 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia

⁷⁶ Zulfikar Gazali, Anhar, Jr. Chaniago. *op.cit.* hlm. 74

yang bersifat terus terang dan jujur supaya segera dapat menyusun UUD dengan tepat... menemukan atau mufakati cara-cara dan norma-norma... lebih sesuai untuk menjamin pelaksanaan tugas Konstituante... berarti UUD pengganti UUDS suatu sumbangan besar bagi kestabilan politik negara kita” (Risalah Perundingan, 1957)⁷⁷

Keinginan Perdana Menteri Djuanda untuk melibatkan pemerintah dalam menyusun Undang-Undang dengan harapan agar UUD baru bisa segera terselesaikan dan ditetapkan guna kestabilan politik negara dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam dan luar negeri Indonesia. Namun kenyataannya, Konstituante keberatan akan keikutsertaan pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang karena menganggap pemerintah melakukan tindakan Inkonstitusional.⁷⁸ Terlepas dari itu, Perdana Menteri Djuanda melakukan kebijakan tersebut demi keamanan negara bukan demi kedudukan dirinya, terlihat dari ketua Panitia Urusan Konstituante yang ditunjuk wakil Kabinet bukan Perdana Menteri.

Konstituante belum dapat memutuskan dasar ideologi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar pengganti UUDS sehingga penyusunan dan penetapan Undang-Undang Dasar menemui jalan buntu hingga akhirnya konstituante melakukan rapat dengan pemerintah dalam persoalan tersebut. Perdana Menteri Djuanda mengetahui adanya ketidak harmonisan ditubuh konstituante dalam penyusunan UUD baru sehingga Perdana Menteri Djuanda mengingat kembali akan UUD 1945, dan mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Keterangan tersebut didapat dari kesaksian Mr Wahab dalam wawancara IO. Nanulaita,

“Pada suatu waktu Pak Djuanda masuk kantor dan memanggil saya, tanpa penjelasan dahulu, Ir. Djuanda menyerahkan sehelai kertas, bertuliskan tangan kepada saya “kembali ke Undang-undang Dasar 1945” diikuti beberapa point. Ir. Djuanda berkata “minta tolong dikerjakan lagi yang lebih diperinci”. Orang lain bisa berkata lain, sepanjang pengetahuan saya ide kembali ke UUD 1945 murni ide dari Perdana Menteri Djuanda bukan konstituante, Nasution, ataupun Ir Soekarno. Pak Djuanda dalam usulnya mengajukan terlebih dahulu ke DPR, dan DPR serta semua jajaran

Kabinet Djuanda setuju akan usul tersebut”⁷⁹

Usulan kembali ke UUD 1945 disetujui Presiden dan dibahas dalam rapat dengan Konstituante tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 1959 namun tanpa ada hasil kesepakatan.⁸⁰ Tidak ada kesepakatan tersebut akibat permasalahan dasar negara yang didebatkan oleh golongan Islam, Nasionalisme, dan Komunis yang sama-sama menginginkan ideologinya menjadi dasar negara. Usaha lain yang sudah ditempuh ialah pengadakan *voting* pemilihan suara mendukung atau tidak mendukung kembali ke UUD 1945.

Ketegangan politik terjadi setelah tidak ada kesepakatan bersama atas usulan Pemerintah dan Presiden mengenai kembali ke UUD 1945 dan masa *reses*⁸¹ Konstituante. Permasalahan tersebut menyulut animo masyarakat dalam mempertanyakan kejelasan akan Undang-Undang Dasar yang gagal ditetapkan. Untuk meredakan ketegangan politik di masyarakat, KSAD Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan peraturan darurat pada tanggal 3 Juni 1959 tentang larangan adanya kegiatan politik.⁸²

Presiden melakukan tugas kunjungan kenegaraan ke Jepang, sehingga dalam pengambilan keputusan atas kegagalan Konstituante dan Pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang dasar pengganti UUDS, Konstituante bersama Pemerintah menunggu kepulangan Presiden. 29 Juni 1959 Presiden sudah berada di Indonesia dan segera mengadakan rapat tanggal 3 Juli 1957 dengan memanggil Mr Sartono, Perdana Menteri Djuanda, Para Menteri dan Dewan Nasional (Roeslan Abdulgani dan M. Yamin).⁸³ Hasil dari rapat tersebut merupakan kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945 karena keputusan ini dirasa tepat dan tidak memihak kepada golongan manapun, dan Presiden mengungkapkan akan mengeluarkan Dekrit.

Dekrit tersebut dibacakan pada tanggal 5 Juli 1959 dan dikenal sebagai Dekrit Presiden dengan rincian:

1. Pembubaran Konstituante,
2. Tidak berlakunya lagi UUDS dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah wakil daerah dan golongan fungsional, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.⁸⁴

Pembacaan Dekrit Presiden tersebut menandakan pembubaran Kabinet Djuanda. Perdana Menteri Djuanda memberikan mandatnya kembali ke Presiden. Kabinet Djuanda sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun tetap ada kekurangan. Terlepas dari itu, banyak masa-masa sulit yang dihadapi Kabinet Djuanda dari permasalahan dalam negeri hingga luar negeri.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ I.O. Nanulaita. *op.cit.* hlm. 152

⁸⁰ Tim Kemendikbud. *op.cit.*hlm. 362

⁸¹ *Reses* ialah masa perhentian sidang (parlemen), masa istirahat dari kegiatan bersidang.

(www.kbbi.web.id/ diakses pukul 05:55 WIB tanggal 6 Maret 2017)

⁸² Tim Kemendikbud. *op.cit.*hlm. 363

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Baca teks asli Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Selepas menjadi Perdana Menteri, Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Pertama di Kabinet Kerja hingga tahun 1963 dan mendapatkan Bintang Bhayangkara dari Presiden pada tahun 1961 atas jasa yang telah diberikan kepada negara.⁸⁵ Pada tanggal 7 November 1963 menjelang jam 1 dini hari Ir. Djuanda menghembuskan nafas terakhir karena mengalami gagal jantung selepas menghadiri rapat di Istana Merdeka dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Penyakit tersebut diderita akibat gaya hidup tidak sehat yang dilakukan Ir. Djuanda karena selalu bekerja tanpa henti demi negaranya tanpa menghiraukan kesehatannya. Ketika sakit dan dirawat di Tokyo Jepang, Ir. Djuanda masih bekerja seperti biasa. Sungguh pengabdian yang luar biasa bagi seorang Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama yang pernah dimiliki Negara Indonesia. Seorang putra emas Indonesia yang tidak akan hilang peran dan jasanya bagi negara. Maka pantaslah jika melalui Surat Keputusan Presiden, Ir. H. Djuanda Kartawidjaya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 29 November 1963.⁸⁶

g. Nilai Pedagogis Pengabdian Ir. Djuanda Kartawidjaya

Perjuangan Ir. Djuanda sebagai seorang Menteri dan Perdana Menteri Indonesia memberikan banyak nilai-nilai teladan bagi generasi muda Indonesia. Berikut merupakan sifat dan sikap dari Ir. Djuanda yang mempunyai jiwa Nasionalisme dalam dirinya:

1. Bertanggung jawab dan disiplin

Bertanggung jawab dan disiplin merupakan sikap yang dimiliki Ir. Djuanda sejak kecil atas didikan orang tuanya yang merupakan seorang guru. Disiplin waktu dan bertanggung jawab atas tugas sekolah dan pekerjaan yang membawanya menjadi seseorang yang cerdas dan berprestasi. Terbukti dengan prestasi yang diperoleh semasa Ir. Djuanda bersekolah di ELS, HBS, dan THS yang merupakan sekolah Belanda. Ir. Djuanda berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dengan anak-anak Belanda bahkan mampu mendapatkan beasiswa ketika kuliah jurusan Ilmu Teknologi di *Technische Hogeschool* Bandung atau yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung.⁸⁷

2. Tekun dan Jujur

Tekun dan jujur merupakan modal Ir. Djuanda dalam menjalani kehidupannya. Menurut kesaksian Prajoedi Atmosoedirdjo, rekan kerja Ir. Djuanda, "Ir. Djuanda seorang yang nasionalis tulen yang moderat, yang jujur, mempunyai visi kenegaraan yang luhur, mampu

loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap negara".

Kesaksian dari rekan kerja Ir. Djuanda juga dibuktikan dari etos kerja yang dengan ikhlas mengabdikan kepada negara. Saat Ir. Djuanda sakit, beliau masih bekerja seperti biasa demi negara dan rela meninggalkan keluarganya untuk tugas negara. Hingga Ir. Djuanda dipanggil sang ilahi, Ir. Djuanda masih bekerja sebagai seorang Menteri Pertama yang merupakan kepercayaan Ir. Soekarno.

"Ir. Djuanda merupakan seorang non partai yang berkali-kali menjadi menteri, seorang yang tidak terlibat dalam pertikaian politik, seorang administrator yang demokratis, seorang pengabdian negara yang setia dan jujur. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan semua pihak mengapresiasinya dan menerima pengangkatannya menjadi Perdana Menteri". Ungkap Mr Maria Ulfa Subadio yang merupakan rekan ketika mengajar di Muhammadiyah dan dipemerintahan.⁸⁸

3. Nasionalisme

Nasionalisme Ir. Djuanda terlihat ketika mampu mengemban tugas menjadi menteri dari beberapa kabinet hingga menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Kepala Djawatan Kereta Api adalah tugas pertama Ir. Djuanda di pemerintahan Indonesia. Tanpa pengalaman apapun mengenai kereta api, namun Ir. Djuanda tetap melaksanakan tugas tersebut dengan belajar dan tidak malu bertanya pada staf pembantunya. Kerendahan hati dan ketenangan Ir. Djuanda menjadi nilai positif yang menginspirasi rekan kerja dan keluarga.

Kerja keras dan pengabdian Ir. Djuanda sebagai anak bangsa Indonesia terlihat hingga akhir hayatnya. Ir. Djuanda memiliki penyakit jantung yang mengaharuskannya berobat ke Tokyo, Jepang. Keadaan sakit Ir. Djuanda tidak menyurutkan semangatnya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan negara dan tetap bertugas sebagaimana biasanya.

Sikap dan sifat Ir. Djuanda merupakan contoh karakter nasionalisme yang harus ditiru oleh generasi muda. Pendidikan karakter dengan mengenalkan tokoh pejuang Republik Indonesia seperti Ir. Djuanda merupakan sesuatu yang tepat karena mampu menginspirasi generasi muda Indonesia yang kini dibuai dengan beragam kemajuan teknologi.

Nilai-nilai karakter yang ditunjukkan dari sikap dan sifat Ir. Djuanda merupakan contoh yang baik bagi generasi muda.

⁸⁵ Keppres RI no 406 tahun 1961, tentang Penyetempatan Bintang Bhayangkara

⁸⁶ KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 244 tahun 1963 tentang Penetapan Ir. Djuanda sebagai Pahlawan Nasional.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ .O. Nanulaita. *loc.cit.* hlm.136

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menegaskan bahwa karakter merupakan hasil dari olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa.⁸⁹ Dengan demikian, Ir. Djuanda merupakan sosok yang tepat bagi generasi muda dan dapat dikembangkan serta diintergrasikan dalam pembelajaran generasi muda penerus bangsa.

D. Penutup

Djuanda Kartawidjaya lahir di Tasikmalaya Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911. Lahir di tengah keluarga guru membuat Djuanda memiliki sikap dan sifat yang disiplin, rajin, jujur, dan mandiri. Prestasi demi prestasi pernah Djuanda raih dari bersekolah di ELS, HBS dan THS yang merupakan sekolah Belanda. Kemampuan yang sejak kecil dimiliki merupakan anugerah yang spesial bagi Djuanda sehingga membawanya menjadi tokoh pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Ir. Djuanda merupakan seorang yang nasionalis dan evolusioner, terlihat dari peran dan sikap Ir. Djuanda terhadap daerah dan negaranya. Ir. Djuanda pernah berjuang bersama masyarakat Jawa Barat dengan menjadi anggota Paguyuban Pasundan, sebuah organisasi yang menentang adanya pemerintahan Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kecerdasan dan keuletan Ir. Djuanda diakui oleh pemerintahan baru Indonesia hingga diangkat menjadi Kepala Djawatan Kereta Api.

Menteri Marathon merupakan julukan Ir. Djuanda karena selama tujuh tahun menjadi menteri di beberapa kabinet, seperti Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo yang dipercaya menjabat sebagai menteri Perhubungan serta di Kabinet Hatta yang dipercaya mengemban tugas menjadi Menteri Perekonomian.

Nasionalisme Ir. Djuanda terlihat ketika mampu mengemban tugas menjadi Menteri dari beberapa kabinet hingga menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Ir. Djuanda yang merupakan lulusan teknik pengairan dan jalan di *Technische Hogeschool* Bandung tidak pernah menolak tugas yang diberikan negara kepada dirinya. Ir. Djuanda menjabat sebagai Kepala Djawatan Kereta Api pada tugas pertamanya di pemerintahan Indonesia. Ir. Djuanda tanpa pengalaman apapun mengenai kereta api namun tetap melaksanakan tugas tersebut dengan belajar dan tidak malu bertanya pada staff pembantunya. Kerendahan hati dan ketenangan Ir. Djuanda menjadi nilai positif yang menginspirasi rekan kerja dan keluarganya.

Evolusioner yang dimiliki Ir. Djuanda ditunjukkan ketika mengeluarkan kebijakan saat menjadi Menteri dan Perdana Menteri. Kebijakan Ir. Djuanda ketika menjadi menteri Perhubungan ialah melakukan renovasi dan pembangunan fasilitas transportasi. Sumbangan besar Ir. Djuanda selama menjadi Menteri Perhubungan ialah perbaikan dan pembangunan gerbong kereta api, lokomotif kereta api serta jalur rel kereta api. Ir. Djuanda memprakarsai pembangunan dan pembentukan

Garuda Indonesia Airways yang merupakan perusahaan pesawat terbang pertama di Indonesia serta PT PELNI sebagai perusahaan kapal pertama Indonesia.

Kebijakan pembangunan Ir. Djuanda tertuju ke masyarakat desa, yang merupakan bagian penting bagi negara Indonesia. Masyarakat desa merupakan penyumbang devisa negara melalui ekspor timah dan karet. Devisa negara tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan pasca kemerdekaan. Ir. Djuanda melakukan pembangunan masyarakat desa dengan menyusun kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

Puncak karir politik Ir. Djuanda dalam pemerintahan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1957, saat beliau dilantik menjadi Perdana Menteri dan memimpin kabinet yang disebut sebagai Kabinet Djuanda. Pelantikan Ir. Djuanda tersebut berdasarkan hasil kerja yang memuaskan selama menjadi Menteri sehingga Ir. Soekarno yang kala itu menjadi formatir kabinet menunjuk Ir. Djuanda menjadi Perdana Menteri atas usulan Ali Sastroamijoyo. Ir. Djuanda merupakan seorang non politik dan tidak terlibat dalam pertikaian politik, seorang administrator yang demokratis, dan seorang pengabdian negara yang setia dan jujur.

Kerja keras dan pengabdian Ir. Djuanda sebagai anak bangsa Indonesia terlihat hingga akhir hayatnya. Ir. Djuanda memiliki penyakit jantung sehingga mengharuskannya berobat ke Tokyo, Jepang. Sakit yang diderita Ir. Djuanda tidak menyurutkan semangatnya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan negara dan tetap bertugas sebagaimana biasanya.

Sikap dan sifat Ir. Djuanda merupakan contoh karakter nasionalisme yang harus ditiru oleh generasi muda. Pendidikan karakter dengan mengenalkan tokoh pejuang Republik Indonesia seperti Ir. Djuanda merupakan sesuatu yang tepat karena mampu menginspirasi generasi muda Indonesia yang kini dibuai dengan beragam kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen.

UU RI Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

B. Surat Kabar Belanda.

_____.1952. *Nieuwsgier*. 6 November. Belanda.

_____.1954. *Java Bude*. 24 Juni. Belanda.

_____. 1957. *Java Bude*. 10 April. Belanda.

C. Majalah.

Majalah Media Keuangan Vol X No. 97/ Oktober 2015.
Satu Nama Seribu Jasa. Jakarta :
Kementrian Keuangan RI

⁸⁹ Marzuki, *Pengintegrasian Pendidikan Berkarakter dalam Pembelajaran di Sekolah*. (Yogyakarta : Universitas

Negeri Yogyakarta, 2012) Tahun II, No 1, Februari 2012. hlm. 34

Majalah *Skets Masa (madjalah lukisan masyarakat)*. No.5-th.II-1 Februari 1959.

D. Jurnal.

Marzuki. 2012. *Pengintegrasian Pendidikan Berkarakter dalam Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun II, No 1, Februari. 2012

Pratama, Aman. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959*. (Socia (Jurnal Ilmu Sosial) mei 2013, Vol. 10, no. 1)

E. Buku.

Budiardjo Miriam. 1978. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Cipta, Andi. 2012. *Mahir Sepakbola*. Bandung : Nuansa Cendikia

Gani, Muhammad 1978. *Kereta Api Indonesia*. Jakarta : Departemen Penerangan Republik Indonesia

Djalal, Hasjim. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Bandung : Binacipta

Djamin, Awaloedin. 2001 *Ir. H.Djuanda : Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara

Gazali, Zulfikar, DKK. 1989. *Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya:Unesa University Press

Kemensos RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial. 2012. *Profil Pahlawan Indonesia*. Jakarta : Kementerian Sosial RI.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut bunga rampai*. Jakarta : Binacipta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Binacipta.

Lain, Husni. 1988. *Mengenal Maritim Angkutan Laut*. Jakarta : Yayasan Bina Maritim

Lapian. *Terminologi Sejarah : 1945 – 1950 & 1950 – 1959*. 1996. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Moedjanto. 1988. *Indonesia Abad Ke-20*. Jogjakarta : Kanisus

Nanulaita. 1983. *Ir. Haji Juanda Kartawijaya*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pringgodigno. 1950. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Pustaka Rakyat.

Ricklefs.1991.*Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Sjamsudin, Nazaruddin. 1988. *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta : Rajawali Press

Subakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Soedarman. 2006. *Jejak-Jejak Pahlawan : Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo

Sundhaussen, Ulf. 1988. *Politik Militer Indonesia*. Jakarta : LP3ES dengan PT New Aqua Press

Suwarno. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. 2012. Yogyakarta : Omba

Tim Kemendikbud. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah 7: Pasca Revolusi*. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve

Tim Penulisan Sejarah Indonesia. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta : Balai Pustaka

Tim Penulisan Sejarah Indonesia. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka

Winarwati, Indien. 2016. *Konsep Negara Kepulauan*. Malang : Setara Press

F. Website.

www.pelni.co.id (diakses tanggal 21 Februari 2017)

www.sipuu.setkab.go.id

www.delpher.nl